

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi adalah salah satu pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan warganya pada suatu negara. Pernyataan ini selaras dengan apa yang di sampaikan oleh Todaro dan Smith (2015) yaitu “Pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup peningkatan pendapatan per kapita, tetapi juga perbaikan kualitas hidup secara menyeluruh, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan distribusi pendapatan”. Seperti negara Indonesia yang merupakan negara berkembang dan berkenaan dengan pembangunan ekonomi yaitu tidak dapat dilepaskan dari peran aktif para warganya, khususnya dalam kegiatan ekonomi yang sifatnya partisipatif dan inklusif. Indonesia dalam membangun perekonomiannya tidak dapat dilepaskan dari konsep ekonomi kerakyatan yang berasal dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Di Indonesia, terdiri dari tiga sektor badan usaha yaitu sektor pemerintah (Badan Usaha Milik Negara), sektor swasta (Badan Usaha Milik Swasta), dan koperasi. Dalam kerangka pembangunan ekonomi yang mengedepankan kesejahteraan bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan, koperasi menjadi lembaga ekonomi yang dipandang ideal karena mengedepankan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, koperasi juga merupakan sokoguru perekonomian nasional, karena dalam pelaksanaannya koperasi berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong. Namun dalam pelaksanaannya saat ini, koperasi di Indonesia

menghadapi tantangan yaitu rendahnya partisipasi anggota, terutama dalam perannya sebagai pengguna dari koperasi itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. Adapun makna dari isi Undang-Undang tersebut bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat tertentu, diangkat secara tetap sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki posisi pemerintahan dan dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda dalam kehidupannya. Seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga bekerja sebagai pedagang membutuhkan modal agar usaha mereka dapat berkembang, bahkan dari mereka pun membutuhkan barang sandang, pangan dan kebutuhan konsumtif lainnya. Dalam merealisasikan keinginan-keinginan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut selalu terkendala pada masalah permodalan khususnya keuangannya, sehingga hampir semua lembaga instansi pemerintahan mendirikan wadah keuangan mikro dalam bentuk koperasi pegawai negeri baik berbentuk konvensional maupun syariah.

Koperasi inilah yang bergerak untuk mengayomi dan memenuhi kebutuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diambilkan dari iuran pokok dan iuran wajib serta berfungsi memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada para

anggotanya dengan kebutuhan yang bervariatif sesuai apa yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Koperasi cukup memberikan pengaruh yang signifikan dan memberikan kontribusi penuh dalam memajukan perekonomian di Indonesia.

Menurut Irawan et al., (2023) “Partisipasi anggota yang aktif sebagai pemilik dan pengguna sangat penting untuk mencapai tujuan dan keberhasilan koperasi secara keseluruhan”. Dari pernyataan tersebut bermakna, koperasi dikatakan berhasil dalam mencapai misinya apabila adanya partisipasi dari anggota koperasinya, dimana anggota dalam badan usaha koperasi mempunyai identitas ganda yaitu sebagai pemilik dan pengguna.

Partisipasi anggota adalah bagian penting dari keberhasilan suatu koperasi yang mencakup hak dan kewajiban serta memengaruhi aktivitas keberlangsungan di koperasi. Hal ini, tak luput dari koperasi yang harus menyediakan, dan memenuhi segala bentuk kebutuhan para anggotanya serta memberikan pelayanan terbaik agar para anggotanya merasakan kepuasan atas apa yang diberikan oleh koperasi. Salah satunya dari kinerja atau hasil kerja yang dilakukan oleh para pengurus koperasi.

Menurut Gusta Hendra (dalam skripsinya dengan judul pengaruh partisipasi anggota terhadap kinerja pengurus KUD Langgeng, 2012) “Berhasil tidaknya suatu koperasi tergantung pada kinerja pengurus koperasi, kinerja mempunyai hubungan yang erat dengan masalah produktivitas. Karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi”.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah merupakan koperasi konsumen yang bergerak di bidang unit usaha simpan pinjam, unit usaha

perdagangan, dan unit usaha penjaminan kredit. Beranggotakan 1.063 orang berdasarkan laporan RAT tahun 2023 dengan nomor badan hukum 4989A/BH/KWK.10/122, tanggal 28 Oktober 1989 yang beralamat di Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16914. Adapun para anggotanya berasal dari kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bekerja di berbagai instansi di bawah naungan Kementerian Agama. Mereka terdiri atas pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan, penyuluhan agama, pegawai kantor Kemenag, pengawas madrasah dan PAIS, serta para guru.

Dengan banyaknya anggota koperasi, diperlukan pengurus koperasi untuk melaksanakan dan mengelola operasional kegiatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah yaitu dengan dibentuknya susunan kepengurusan yang berdasarkan hasil RAT tahun 2023. Maka, peneliti melampirkan data pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah

No	Nama Pengurus	Jabatan	Instansi
1	H. Muslimin Ansori, M,Si	Ketua	Kepala Seksi PHU
2	H. Zaenudin, M,Pd	Wakil Ketua	Pengawas
3	H. Shilahuddin Nur, S.Ag	Sekretaris	Kepala KUA
4	Hasan Sajili. S,Ss..	Wakil Sekretaris	Pegawai kantor Kemenag
5	H. Wildanurahman Zaini, SE., MM	Bendahara	Pegawai kantor Kemenag

Sumber:RAT Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah tahun 2019-2023

Dari Tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pengurus yang ada di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah berjumlah lima (5) orang dengan

jabatan serta instansi yang berbeda-beda antara satu pengurus dengan pengurus yang lain.

Berdasarkan hasil survei yang peneliti amati dengan melakukan observasi dan wawancara bersama salah satu pengurus dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah serta melihat dan membaca hasil Laporan Rapat Anggota Tahunan periode 2019 sampai 2023 bahwa perkembangan unit usaha simpan pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia mengalami naik turun secara fluktuasi (kondisi atau keadaan yang tidak stabil dan selalu berubah-ubah), khususnya pada unit usaha simpan pinjam. Hal tersebut ditentukan oleh turunnya partisipasi anggota sebagai pengguna terhadap koperasi terutama pada unit usaha simpan pinjam.

Berikut adalah data jumlah anggota dan jumlah anggota yang bertransaksi pada unit usaha simpan pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah dari tahun 2019 hingga 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Anggota Dan Anggota Yang Bertransaksi pada Unit Usaha Simpan Pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah Tahun 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Anggota (orang)	1.243	1.201	1.159	1.118	1.063
Anggota Yang Bertransaksi (orang)	662	568	501	477	451
Persentase Partisipasi Anggota (%)	53,26	47,29	43,22	42,66	42,43

Sumber:RAT Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah tahun 2019-2023

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami tren penurunan yang sangat signifikan, penurunan yang terjadi sangat

signifikan pada tahun 2023 dimana jumlah anggota tercatat hanya sebanyak 1.063 anggota. Kondisi ini sejalan dengan penurunan jumlah anggota yang bertransaksi pada unit usaha simpan pinjam, dalam tahun yang sama hanya mencapai 451 anggota.

Akibatnya, persentase partisipasi anggota pada tahun 2023 tercatat sebesar 42,43% yang mencerminkan tingkat partisipasi yang rendah. Rendahnya partisipasi anggota ini dipengaruhi oleh dua hal utama yaitu, menurunnya jumlah anggota secara keseluruhan dan semakin sedikitnya anggota yang aktif melakukan transaksi. Dilihat dari data persentase partisipasi anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah menunjukkan adanya tren penurunan jumlah anggota aktif dalam lima tahun terakhir, hal ini mencerminkan adanya indikasi menurunnya keterlibatan anggota dalam kegiatan koperasi.

Dalam struktur organisasi koperasi, sebagaimana Tabel 1.1 pengurus terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara koperasi. Masing-masing pengurus memiliki tugas atau *jobdesk* dalam mengelola koperasi, idealnya ketua bertugas dalam memimpin jalannya koperasi, mengkoordinasikan dan mengarahkan seluruh pengurus, serta menjadi penanggung jawab utama dalam pelaksanaan kebijakan strategis koperasi. Dalam praktiknya, belum sepenuhnya optimal dalam mengarahkan seluruh pengurus yang berfokus dalam meningkatkan partisipasi anggota sebagai pengguna pada unit usaha simpan pinjam, diduga karena kesibukan pekerjaan yang lain bukan hanya di koperasi.

Wakil ketua berperan sebagai pendukung dan pengganti ketua dalam hal-hal teknis maupun hal yang strategis seperti mengawasi pelaksanaan unit usaha. Wakil

ketua turut mengarahkan unit usaha khususnya pada unit usaha simpan pinjam agar lebih aktif dalam mempromosikan manfaat penggunaan layanan simpanan dan pinjaman yang telah disediakan koperasi. Dalam praktiknya, belum maksimal dalam mengawasi unit usaha simpan pinjam, seperti promosi layanan simpanan dan pinjaman yang masih terbatas dan beberapa anggota belum mengetahui manfaat yang diperoleh dari layanan yang disediakan koperasi.

Sekretaris bertugas untuk bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, penyusunan laporan, serta pengarsipan dokumen koperasi, dibantu oleh wakil sekretaris yang juga memiliki tugas untuk membantu pengelolaan data keanggotaan dan sistem informasi koperasi. Namun, dalam praktiknya masih banyak informasi yang belum tersampaikan kepada anggota secara menyeluruh mengenai program dan layanan yang ada di koperasi, ini menunjukkan lemahnya sosialisasi kepada para anggota koperasi secara menyeluruh.

Terakhir, bendahara bertugas dalam memegang tanggung jawab pengelolaan keuangan koperasi, termasuk dari pencatatan transaksi, pengawasan laporan masuk dan keluarnya arus kas, hingga penyusunan RAPBK bersama ketua dan sekretaris serta membuat laporan keuangan berkala. Namun, dalam praktiknya belum semua anggota mendapatkan laporan keuangan secara transparan.

Sebagaimana tugas bendahara yang telah dijelaskan di atas, salah satunya yaitu menyusun laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) dan realisasi anggaran dalam lima tahun terakhir, terlihat bahwa unit usaha simpan pinjam mengalami penurunan dari sisi rencana pendapatan pada tahun terakhir. Sebaliknya, pada unit usaha perdagangan, baik RAPBK maupun

realisasinya justru mengalami peningkatan, yang menunjukkan tren positif dalam aktivitas unit usaha perdagangan.

Hal tersebut dapat diketahui melalui Tabel 1.3 tentang Perkembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) dan realisasi unit usaha simpan pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah pada tahun 2019-2023.

Tabel 1.3 Perkembangan RAPBK dan Realisasi Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah Pada Tahun 2019-2023

No	Tahun	RAPBK (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2019	1.680.000.000	1.736.156.092	103,34
2	2020	1.755.000.000	1.945.673.798	110,86
3	2021	2.125.000.000	1.773.025.500	83,44
4	2022	2.175.000.000	1.744.665.758	80,21
5	2023	1.875.000.000	1.765.384.708	94,15

Sumber: RAT Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah tahun 2019-2023

Berdasarkan Tabel 1.3 mengenai perkembangan RAPBK dan realisasi unit usaha simpan pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah pada tahun 2019-2023, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2019-2023, RAPBK menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2022, sedangkan realisasi menunjukkan penurunan di tahun 2022 yaitu sebesar 80,21%. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program kerja koperasi, diduga kurangnya koordinasi antar pengurus dalam menindaklanjuti program kerja yang telah dirancang, kurangnya pemantauan

terhadap pelaksanaan kegiatan usaha koperasi. Namun mengalami kenaikan kembali di tahun 2023 yaitu sebesar 94,15%.

Kemudian dilihat dari Tabel 1.4 tentang Perkembangan RAPBK dan realisasi unit usaha perdagangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah pada tahun 2019-2023.

Tabel 1.4 Perkembangan RAPBK dan Realisasi Unit Usaha Perdagangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah 2019-2023

No	Tahun	RAPBK (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2019	130.000.000	201.310.164	154,85
2	2020	142.500.000	27.431.000	19,25
3	2021	55.000.000	92.561.463	168,29
4	2022	115.000.000	131.422.671	114,28
5	2023	1.010.000.000	2.511.390.858	248,65

Sumber: RAT Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah tahun 2019-2023

Berdasarkan Tabel 1.4 mengenai perkembangan RAPBK dan realisasi unit perdagangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah pada tahun 2019-2023, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2019-2023, RAPBK menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 sampai tahun 2023, realisasi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2021 hingga 2023 yaitu sebesar 248,65%.

Sedangkan dari unit usaha penjaminan kredit pengelolaannya belum dilakukan secara terpisah, melainkan masih tergabung dalam bagian usaha koperasi secara umum. Maka, dari kedua Tabel di atas menunjukkan adanya kecenderungan penurunan partisipasi anggota dalam memanfaatkan layanan terkhusus, pada unit

usaha simpan pinjam. Perbedaan kondisi ini menjadi alasan bagi peneliti untuk memfokuskan penelitian pada unit usaha simpan pinjam, guna menganalisis kinerja pengurus dalam mengupayakan peningkatan partisipasi anggota sebagai pengguna pada unit usaha simpan pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah.

Unit usaha simpan pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah dalam kegiatan usahanya yaitu pemberian layanan pinjaman kepada anggota berupa uang tunai, penghimpunan simpanan anggota, serta pengembalian pinjaman yang dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan dilihat dari laporan RAT. Hal ini bertujuan dalam upaya pemenuhan kebutuhan anggota guna meningkatkan kesejahteraan anggota.

Unit usaha simpan pinjam merupakan unit usaha yang paling difokuskan dari unit usaha lain yang ada di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah, dikarenakan sumber pendapatan terbesar koperasi diperoleh dari unit usaha simpan pinjam dan paling banyak diminati oleh para anggotanya. Namun dalam pelaksanaannya, setelah melihat laporan Rapat Anggota Tahunan selama lima tahun terakhir ini, diketahui partisipasi anggota sebagai pengguna pada unit usaha simpan pinjam mengalami penurunan terhadap layanan simpanan-simpanan yang ada pada unit usaha simpan pinjam, kecuali simpanan hari raya yang mengalami peningkatan.

Hal tersebut dapat diketahui melalui Tabel 1.5 mengenai Partisipasi Anggota Berupa Simpanan Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah Tahun 2019-2023 yakni sebagai berikut:

Tabel 1.5 Partisipasi Anggota Berupa Simpanan Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah Tahun 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Simpanan Sukarela (Rp)	661.611.684	939.507.373	1.235.301.891	1.338.728.216	1.208.485.345
Persentase (%)	-	29,58	23,95	7,73	(10,78)
Simpanan Hari Raya (Rp)	842.981.045	787.167.045	769.660.045	1.141.438.045	1.195.691.045
Persentase (%)	-	(7,09)	(2,27)	32,57	4,54
Simpanan Hari Tua (Rp)	95.545.755	94.352.755	92.277.755	88.996.327	86.166.327
Persentase (%)	-	(1,26)	(2,25)	(3,69)	(3,28)

Sumber: RAT Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah tahun 2019-2023

Berdasarkan Tabel 1.5 mengenai Partisipasi Anggota Berupa Simpanan Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah Tahun 2019-2023, dapat disimpulkan bahwa ada tiga simpanan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah. Simpanan pertama yaitu simpanan sukarela pada unit usaha simpan pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah mengalami tren peningkatan selama tiga tahun terakhir, namun mengalami penurunan cukup drastis di tahun terakhir yaitu di tahun 2023 sebesar 10,78%.

Simpanan kedua yaitu simpanan hari raya pada unit usaha simpan pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah mengalami penurunan partisipasi dari anggotanya pada tahun 2020 sebesar 7,09% sampai tahun 2021 yaitu sebesar 2,27%. Sebelum akhirnya mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022 sebesar 32,57% atau senilai Rp1.141.438.045 dan di tahun 2023 senilai Rp1.195.691.045.

Ketiga yaitu simpanan hari tua pada unit usaha simpan pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah mengalami tren penurunan partisipasi anggota selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Penurunan signifikan terjadi di tahun 2023 sebesar 3,28% atau senilai Rp86.166.327.

Selain data partisipasi anggota sebagai pengguna dalam bentuk simpanan, anggota pun berpartisipasi dalam layanan pinjaman. Dapat dilihat dari Tabel 1.6 mengenai Partisipasi Anggota Berupa Pinjaman Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah Tahun 2019-2023.

Tabel 1.6 Partisipasi Anggota Berupa Pinjaman Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah Tahun 2019-2023

No	Tahun	Pinjaman (Rp)	Perubahan (Rp)	Persentase (%)
1	2019	13.339.968.987	-	-
2	2020	11.722.779.253	(1.617.189.734)	(12,12)
3	2021	10.103.623.923	(1.619.155.330)	(13,81)
4	2022	12.856.812.001	2.753.188.078	27,65
5	2023	13.453.354.236	596.542.235	4,64

Sumber: RAT Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah tahun 2019-2023

Berdasarkan Tabel 1.6 mengenai Partisipasi Anggota Berupa Pinjaman Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah Tahun 2019-2023, dapat disimpulkan bahwa pinjaman pada unit usaha simpan pinjam

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 12,12% dan ditahun 2021 yaitu sebesar 13,81%, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022-2023.

Dalam konteks unit usaha simpan pinjam koperasi, partisipasi anggota sebagai pengguna sangat penting untuk keberlangsungan dan pertumbuhan koperasi. Akan tetapi, dari data Tabel 1.5 dan 1.6 menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, layanan simpanan sukarela dan simpanan hari tua mengalami penurunan, sementara simpanan hari raya dan layanan permohonan pinjaman oleh anggota menunjukkan peningkatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja pengurus dalam mengelola dan mempromosikan layanan simpanan dan pinjaman yang ada di koperasi.

Partisipasi anggota dipengaruhi oleh kinerja pengurus, jika pengurus mampu memberikan pelayanan dengan baik maka anggota pun akan lebih memilih koperasi sebagai badan usaha untuk memenuhi kebutuhannya dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Tetapi kinerja pengurus juga dipengaruhi oleh partisipasi anggota dalam menetapkan hal pengambilan keputusan.

Kinerja pengurus pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah berada dalam kondisi yang perlu ditingkatkan kembali. Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang terjadi di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah, adanya beberapa dugaan penyebab kinerja pengurus perlu dioptimalkan kembali, diduga belum mampu menyelesaikan tugas pengurus dengan baik, maka diindikasikan sebagai berikut:

1. Tidak menentunya waktu dan jadwal bagi pengurus untuk datang ke koperasi.
2. Tidak adanya absensi bagi pengurus.
3. Pengurus masih kurang koordinasi dan kerja sama dengan anggota di koperasi.

Dugaan-dugaan tersebut memberikan dampak bagi para anggota koperasi, dalam pencairan dana pinjaman anggota pada unit usaha simpan pinjam. Oleh karena itu, para karyawan unit usaha simpan pinjam hanya bisa memberikan dana pinjaman apabila disetujui dan ditanda tangani langsung oleh pengurus.

Berdasarkan keterangan dari beberapa anggota, inisiatif untuk meminta bantuan ketika berada di koperasi cenderung berasal dari pihak anggota sendiri, bukan dari pengurus koperasi. Maka, ini menunjukkan bahwa anggota tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak aktif yang berhak dilayani segala kebutuhannya, dengan demikian diperlukan adanya kerja sama yang sinergis antara anggota bersama pengurus koperasi. Hal tersebut diduga karena kesibukan pengurus bukan hanya di koperasi melainkan memiliki *double job* sebagai ASN yang bekerja di setiap kantornya masing-masing, sehingga belum mampu menyelesaikan tugas dengan baik.

Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat fenomena-fenomena yang dilihat dari Tabel 1.2 sampai Tabel 1.6, maka terdapat permasalahan yang sangat menarik untuk diteliti yang berkaitan dengan partisipasi anggota sebagai pengguna pada unit usaha simpan pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi teoritis dalam peningkatan kinerja

pengurus yang efektif kepada para anggotanya, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi organisasi dalam mengoptimalkan peran pengurus sebagai garda terdepan dalam mengupayakan peningkatan partisipasi anggota di koperasi.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Indah Mulyani dengan judul Analisis Kinerja Pengurus Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Anggota, studi kasus pada unit simpan pinjam Primer Koperasi Darma Putra Tri Dharma pada tahun 2021. Dimana hasil dari penelitiannya adalah hubungan kinerja pengurus dengan partisipasi anggota saling berkaitan karena jika kinerja pengurus baik maka partisipasi anggota akan meningkat dan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan koperasi.

Serta penelitian lain yang telah dilakukan oleh Nensi Ulandari dengan judul Pengaruh Profesionalisme dan Kinerja Pengurus KUD Mandiri Terhadap Peningkatan Partisipasi Anggota Di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai pada tahun 2021, di mana hasil penelitiannya adalah Kinerja pengurus KUD Mandiri mempunyai pengaruh terhadap peningkatan partisipasi anggota di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. Jadi, dapat dikatakan tinggi rendahnya tingkat partisipasi anggota koperasi dipengaruhi oleh kinerja pengurus koperasi.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fenomena yang ada di koperasi serta penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Pengurus Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Anggota Sebagai Pengguna” studi kasus pada Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diuraikan pada latar belakang penelitian, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pengurus pada unit usaha simpan pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah.
2. Bagaimana partisipasi anggota sebagai pengguna pada unit usaha simpan pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah.
3. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi anggota sebagai pengguna melalui kinerja pengurus pada unit usaha simpan pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah yang terletak di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Nomor45, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16914, dilakukan dengan maksud dan tujuan yang diuraikan dalam subbab-subbab sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini memiliki maksud untuk menganalisis kinerja pengurus dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi anggota sebagai pengguna studi kasus pada unit usaha simpan pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah Kabupaten Bogor.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja pengurus pada unit usaha simpan pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah.
2. Untuk mengetahui partisipasi anggota sebagai pengguna pada unit usaha simpan pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi anggota sebagai pengguna melalui kinerja pengurus pada unit usaha simpan pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amanah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memicu minat dalam kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan bacaan mengenai analisis kinerja pengurus dalam upaya meningkatkan partisipasi anggota sebagai pengguna, yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan koperasi khususnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, informasi, dan bahan penelitian bagi pihak yang berhubungan dengan analisis kinerja pengurus dalam upaya meningkatkan partisipasi anggota sebagai pengguna. Hal tersebut dapat menjadi patokan bagi koperasi guna meningkatkan kinerja pengurusnya, selain itu dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk peneliti lain yang meneliti dengan topik yang serupa atau terkait.